



Judul : Kalau Peradaban Kita Mau Maju, Kurangi Motornya
Tanggal : Selasa, 27 November 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1

FAHRI HAMZAH

Wakil Ketua DPR

Kalau Peradaban Kita Mau Maju, Kurangi Motornya

Kenapa Anda bilang janji PKS itu keliru?

Kalau peradaban kita mau lebih maju, kurangi sepeda motornya. Karena motor menurut saya, mohon maaf ya, kendaraan darurat. Untuk menuju peradaban yang lebih maju, seharusnya kita justru mendorong pengurangan sepeda motor di Indonesia, dengan cara menaikkan pajak, seperti Singapura.

Di sana aja (pajak) kendaraan bermotor dinaikkan setinggi-tingginya, dengan tujuan agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum. Jadi motor sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan ditambah. Yang kita tambah itu mass public transportation, atau transportasi umum. Majunya keadaban suatu kota itu, menurut saya ditandai dengan mass transportation, bukan dengan menjamurnya motor.

Tapi kebutuhan masyarakat akan sepeda motor kan juga tinggi, dan penghapusan pajak jelas bisa meringankan beban mereka?

Ya memang akhirnya karena masyarakat tidak punya akses kepada public transportation, maka mereka mengambil alat transportasi yang paling mungkin, dan itu adalah sepeda motor. Makanya motor itu semakin hari tambah banyak, karena memang masyarakat tidak punya pilihan terhadap transportasi publik.

Kalau masyarakat punya pilihan terhadap transportasi publik yang massif, massal, dan murah, tentu mereka tidak akan mengambil risiko untuk mengambil motor. Dimana menurut riset Kementerian Perhubungan adalah

lik gitu. Apalagi kalau pakai filosofi rung publik, motor dan mobil itu termasuk kategori kendaraan privat yang mengambil ruang publik. Karena jalan kan tidak nambah, jalan segitu-segitu saja. Kalau kita pakai transportasi massal, banyak orang di dalam bus, dalam kereta api dengan space yang dipakai itu sangat kecil.

Tetapi kalau kita biarkan masyarakat itu dengan motor dan mobil, dia memakai space ruang publik yang kecil dan tidak nambah ini, semakin hari semakin banyak, maka hak lain atas ruang publik itu berkurang. Termasuk hak dari kendaraan umum yang mengutuk lebih banyak rakyat. Itu yang harus dipikirkan, jangan kemudian atas nama mau membela sekelompok kendaraan pribadi, termasuk motor lalu kita mengurangkan ruang publik. Itu cara berfikir yang sehat.

Berarti cara berpikir PKS enggak sehat ya?

Jelas tidak. Janji yang disampaikan itu, menurut saya adalah cara berpikir yang salah, dan kurang tinggi dalam memfilsafati urusan publik. Janji itu menurut saya adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Lho kok dibalik sama PKS, gimana sih. Ini (PKS) mau berjuang buat siapa? Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Kalau berpolitik itu, harusnya menerapkan politik perlindungan, proteksi begitu.

Jadi filsafatnya yang harus dilindungi itu adalah limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik.



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Jenis kendaraan yang risikonya paling tinggi, tingkat kematianya paling tinggi, dan tingkat kecelakaan yang tinggi juga.

Dari kecelakaan itu, risiko kematianya paling banyak diterima oleh ibu-ibu, remaja, dan anak-anak. Remaja dan anak-anak yang suka pakai motor itu semua jadi korban. Jadi motor itu seperti mesin pembunuh. Kalau masyarakat itu punya akses ke transportasi publik yang murah, tentu mereka enggak akan naik motor. Itulah sebabnya fokus negara itu jangan kepada kendaraan yang berisiko tinggi ini, tetapi kepada transportasi publik yang murah dan massif.

Saya kira itu yang benar cara berpikirnya, bukan dibawa



Berarti solusi yang tepat itu meningkatkan transportasi publik ya bukan membebaskan pajak motor?

Ya memang prioritasnya itu transportasi publik, negara harus bicara transportasi publik, bukannya transportasi darurat yang mengancam nyawa masyarakat. Justru kan masyarakat itu harus dilindungi, supaya terbebas dari kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi fokus negara jangan cari popularitas, tetapi mencari kebijakann yang menyelamatkan warga negara.

Tetapi untuk mendapatkan transportasi publik yang mumpuni kan butuh waktu lama. Itu bagaimana?

Sebelum ada ya harus diadakan. Jangan malah mengembangkan instrumen yang mengancam tadi. Dan kalau mau sekali lagi ya justru pajaknya harus dinai-kan, supaya orang tidak memilih alat transportasi yang mengancam mereka. Kedua diperketat pengawasannya, misalnya harus pakai helm dan jaket yang bisa menyelamatkan nyawa. Semua itu saya kira yang harus diprioritaskan.

Kalau soal usulan SIM seumur hidup bagaimana?

SIM juga adalah terkait dengan fasilitas pribadi untuk mengendara. Terutama SIM yang dipakai untuk kendaraan pribadi. Di negara-negara kemajuananya tinggi, orang itu tidak punya SIM maka dia tidak bisa mengendara. Tapi kendaraan umumnya sudah siap tersedia, ada kereta api, ada bus umum yang besar, itu yang punya SIM cukup pengendara busnya saja.

Kalau semua orang diberikan SIM, itu artinya kan semua orang akan ter dorong lagi untuk mengambil ruang publik. Jadi sebetulnya teori SIM itu adalah teori fasilitas. Jadi dengan fasilitas itu orang akan punya kesempatan mengambil alih ruang publik untuk mengendarai. Lagi-lagi filsafatnya adalah filsafat ruang publik.

Keterbatasan ruang publik bukan diatasi dengan cara memberi kebebasan kepada individu untuk mengambil space yang terbatas itu, tetapi memperbanyak kendaraan massal yang murah, sehingga betul-betul menerima keadilan yang sebenarnya. ■ NDA